

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROFIL PERANGKAT DAERAH





Tugas & Fungsi

TUGAS

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum

FUNGSI

- penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

PROFIL PERANGKAT DAERAH





Tugas & Fungsi

TUGAS

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

FUNGSI

- penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- penyiapan bahan dan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- penyiapan bahan dan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;
- penyiapan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- penyiapan bahan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;
- penyiapan bahan penyusunan program pembentukan peraturan daerah provinsi;
- penyiapan bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- penyiapan bahan permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- penyampaian Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur ke Pemerintah;



Lanjutan

FUNGSI

- penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain baik daerah maupun pusat;
- penyiapan bahan untuk mengoordinasikan Penyusunan Keputusan Gubernur;
- penyiapan bahan dan mengharmonisasi penyusunan rancangan Keputusan Gubernur;
- penyiapan bahan penetapan Keputusan Gubernur;
- penyiapan bahan penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah;
- penginputan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- penginputan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan ke dalam JDIH;
- penghimpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan;
- penyiapan bahan dan melaksanakan penyebarluasan produk hukum;
- pelaksanaan pelayanan JDIH;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan pendokumentasian Hukum;
- penyiapan bahan kajian produk hukum daerah;
- penyiapan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum lainnya;
- penyiapan bahan harmonisasi produk hukum lainnya;
- penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun ditingkat pusat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGIAN BANTUAN HUKUM

PROFIL PERANGKAT DAERAH





Tugas & Fungsi

TUGAS

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Litigasi, Non Litigasi dan HAM

FUNGSI

- penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Litigasi, Non Litigasi dan HAM;
- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;
- pelaksanaan penyiapan konsep penanganan sengketa Pemerintah Provinsi pada bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Pengujian Materi Perundang-Undangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain untuk penyusunan bahan persidangan;
- pelaksanaan penyiapan konsep bahan persidangan dalam penanganan sengketa Pemerintah Provinsi di Pengadilan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan telaahan dan pertimbangan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain dalam rangka menyusun telaahan dan pertimbangan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi;



Lanjutan

FUNGSI

- pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi Pemerintah dan Pihak Lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan Hak Asasi Manusia;
- pelaksanaan penyiapan dan pengumpulan bahan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi secara berkala;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

PROFIL PERANGKAT DAERAH





Tugas & Fungsi

TUGAS

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Produk Hukum Kabupaten/Kota

FUNGSI

- penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- penyiapan bahan dalam rangka klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan asistensi dalam penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.